

BAB III

REGULASI FTZ DI BATAM

Di dalam bab III, penulis ini menjabarkan beberapa regulasi terkait *Free Trade Zone* Batam, dilengkapi juga table rancangan indikator untuk memudahkan dalam konten analisis. Konten analisis ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitas tata kelola paradiplomasi terkait kebijakan-kebijakan *Free Trade Zone* di Batam, terdiri dari 10 regulasi nasional yang berlaku.

Kebijakan dalam penentuan FTZ terdiri dari berbagai macam kepentingan yaitu dari segi politik-pemerintahan, sosio-ekonomi, pertahanan keamanan dan lingkungan itu sendiri. Pemberlakuan Batam sebagai FTZ sesungguhnya merupakan suatu kebijakan nasional di ekonomi. Kebijakan “pro-business” ini diharapkan akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi makro dan pemacu pembangunan ekonomi mikro yang sekaligus penguatan dalam penerimaan kas Negara dan pendapatan daerah secara langsung dan tidak langsung. Dari hal ini dapat dilihat Batam dengan wilayah yang berdekatan dengan Negara tetangga, dapat dijadikan daerah menarik investasi asing sehingga di keluarkan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan bebas dan pelabuhan bebas Batam dan dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011.

Dengan hal ini, pemerintah pusat memberikan wewenang ke pemerintah daerah untuk melakukan tanggungjawab daerahnya sendiri yang disebut desentralisasi. Sehingga pemerintah daerah memuli hak “otonom” dalam pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan. Dan dikeluarkan Undang-Undang tentang

Pemerintah Daerah No 32 Tahun 2004 diganti menjadi UU 23 Tahun 2014. Untuk mengoptimalkan peran pemerintah khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi public, maka sulit dipungkiri bahwa pelaksanaannya harus bersinggungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, ada dua hal yang bersinggungan yaitu. Pertama, pengaturan relasi kewenangan dan keuangan antartingkatan pemerintahan (pusat-daerah dan antar pemerintah daerah) dalam menopang pelaksanaannya. Kedua, pengaturan hak dan tanggungjawab pemerintah, baik dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki maupun dalam mendapatkan manfaat atas keberadannya.¹

Koordinasi lintas pemerintah daerah menjadi hal yang penting dalam awal pementukan FTZ dikarenakan dalam lingkup pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua pemerintah kota yaitu Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Tanjungpinang, serta dua kabupaten yaitu Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Sehingga, ditingkat pemerintah Provinsi dapat membangun hubungan dari keempat pemerintahan ini agar pelaksanaan dapat berjalan dengan semestinya².

Pada mulanya tahun 2007, Pemerintah sudah menyiapkan Batam, Bintan dan Karimun menjadi wilayah FTZ dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah 46, 47, 48 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Batam dilakukan perubahan

¹ Syarif Hidayat dan Agus Syarif Hidayat, *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, Hal : 101

² *Ibid* Hal: 170

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011. Dibandingkan dua daerah lainnya, Batam memiliki masalah yang lebih kompleks karena memiliki dualisme kepemimpinan, dan Batam merupakan kota besar.

Analisis Isi Terhadap Regulasi FTZ Batam

A. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

1. Aktor

Peraturan pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2011 ini. Indikator yang ditemukan dalam beberapa kata kunci yang ditemukan adalah didalam aktor pusat terdiri Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Hasil dari isi konten tersebut, ditemukan kata kunci terbanyak dari aktor pusat dengan total 7 kata, aktor daerah 3 kata sedangkan untuk aktor swasta tidak ditemukan hasilnya atau berjumlah 0.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Tata Kelola Perdagangan Bebas ini memiliki beberapa kata kunci untuk mengetahui sejauh mana luasan subjek yang tercakup dalam peraturan ini. Indikator Tata Kelola Perdagangan Bebas dengan beberapa kata kunci antara lain dalam Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan

(PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W) berjumlah 1 kata. Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T) berjumlah 4 kata, dengan total 5 kata dari keduanya.

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Dari sisi Efisiensi Manajemen Pelabuhan, dari keseluruhan kata kunci yang dicari ditemukan dengan jumlah 43 kata. Adapun seluruh kata kunci tersebut dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestic) yaitu Pembebasan (PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP) dengan jumlah 43 kata. Outward Looking (melayani kebutuhan luar negeri) antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP) namun, didalam diksi ini tidak ditemukan sama sekali kata yang digunakan.

Tabel 3.1

Indikator		Keywords	Score
Aktor	Pusat	Presiden (P)	0
		Pemerintah Pusat (PP)	0
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	2
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	0
		Kepala Badan Pengusahaan (KP)	5
	Jumlah		7
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	3
		Pemerintah Daerah (PD)	0
		Gubernur (G)	0
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
		Kepala Daerah (KD)	0
	Jumlah		3
Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	0	
Jumlah		0	
Total			10
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	0
		Perdagangan Internasional (KI)	0
		Percepatan (PC)	0
		Jaminan (J)	0
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	0
		Waktu (W)	1
	Jumlah		1
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	0
		Pertimbangan (PB)	1
		Pengurusan (PU)	1
		Pajak (PA)	0
		Kendala (KE)	2
		Tarif (T)	0
Jumlah		4	
Total			5
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	0
		Bandar Udara (BU)	0
		Pelabuhan Nasional (PN)	2
		Infrastruktur (I)	0
		Pelayanan (PL)	0
		Badan Pengusahaan (BP)	41
		Jumlah	
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	0
		Bea Cukai (BC)	0
		Pelabuhan Internasional (PI)	0
		Fasilitas (F)	0
		Tempat Penimbunan (TP)	0
	Jumlah		0
Total			43

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

B. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Kepulauan Riau

1. Aktor

Keputusan Pemerintah tahun 2018 tentang Dewan Kawasan ini dibentuk untuk memaksimalkan kinerja di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Indikator ini terdiri dari beberapa kata kunci yaitu aktor pusat terdiri dari Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Pemerintah (PM), Direktorat Jenderal (DJ), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Kepala Badan Pengusahaan (KP), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Jumlah *keywords* yang ditemukan dalam aktor pusat berjumlah 6 kata, aktor daerah 8 kata dan aktor swasta 0 kata. Dengan jumlah keseluruhan kata dalam indikator aktor yaitu 14 kata.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Dalam melakukan analisis konten terhadap indikator Tata Kelola Perdagangan Bebas, penulis menggunakan beberapa kata kunci yaitu Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W) dengan jumlah 2 kata. Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T). Dari keseluruhan *keyword* yang dicari tidak ditemukannya yang berkaitan terhadap indikator disinvestasi.

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Beberapa kata kunci dalam indikator Efisiensi Manajemen Pelabuhan antara lain dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestik) yaitu Pembebasan (PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP). Outward Looking (melayani kebutuhan luar negeri) antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat

Penimbunan (TP). Dari hasil konten analisis ini, pendeteksian tidak membuahkan hasil dengan setiap kata kunci memiliki nilai 0.

Tabel 3.2

Indikator		Keywords	Score
Aktor	Pusat	Presiden (P)	6
		Pemerintah Pusat (PP)	0
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	0
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	0
		Kepala Badan Pengusahaan (KP)	0
	Jumlah		6
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	7
		Pemerintah Daerah (PD)	0
		Gubernur (G)	1
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
		Kepala Daerah (KD)	0
	Jumlah		8
Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	0	
Jumlah		0	
Total			14
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	0
		Perdagangan Internasional (KI)	0
		Percepatan (PC)	1
		Jaminan (J)	0
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	0
		Waktu (W)	1
	Jumlah		2
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	0
		Pertimbangan (PB)	0
		Pengurusan (PG)	0
		Pajak (PA)	0
		Kendala (KE)	0
Tarif (T)		0	
Jumlah		0	
Total			2
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	0
		Bandar Udara (BU)	0
		Pelabuhan Nasional (PN)	0
		Infrastruktur (I)	0
		Pelayanan (PL)	0
		Badan Pengusahaan (BP)	0
	Jumlah		0
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	0
		Bea Cukai (BC)	0
		Pelabuhan Internasional (PI)	0
		Fasilitas (F)	0
		Tempat Penimbunan (TP)	0
		Jumlah	
Total			0

Sumber: Keputusan Presiden No 4 Tahun 2018 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau

C. Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam

1. Aktor

Keputusan bersama ini yang diterbitkan pada tahun 2017, mendeteksi berbagai kata kunci terkait indikator aktor yaitu aktor pusat terdiri dari Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Berdasarkan hasil konten analisis yang dilakukan, aktor pusat memiliki kata terbanyak pertama dengan jumlah 27 kata, aktor daerah memiliki kata kedua terbanyak 3 kata dan aktor swasta memiliki kata terbanyak ketiga dengan jumlah 2 kata.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Salah satu indikator dalam konten analisis ini yaitu Tata Kelola Perdagangan Bebas yang terdiri dari beberapa kata kunci antara lain Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W). Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T). Kata kunci lain yang ditemukan dalam Pro-Investasi 5 kata sedangkan, disinvestasi berjumlah 15 kata.

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Dalam melakukan analisis konten dalam Keputusan Bersama ini, penulis menggunakan beberapa kata kunci yaitu dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestic) yaitu Pembebasan (PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP) dengan jumlah 29 kata. Outward Looking

(melayani kebutuhan luar negeri) antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP) kata yang ditemukan berjumlah 17.

Tabel 3.3

Indikator	Keywords	Score	
Aktor	Pusat	Presiden (P)	1
		Pemerintah Pusat (PP)	1
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	17
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	0
		Kepala Badan Pengusahaan (KP)	8
	Jumlah	27	
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	3
		Pemerintah Daerah (PD)	0
		Gubernur (G)	0
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
		Kepala Daerah (KD)	0
	Jumlah	3	
	Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	2
	Jumlah	2	
Total		32	
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	0
		Perdagangan Internasional (KI)	1
		Percepatan (PC)	0
		Jaminan (J)	0
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	2
		Waktu (W)	2
	Jumlah	5	
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	3
		Pertimbangan (PB)	3
		Pengurusan ((PG)	4
		Pajak (PA)	0
		Kendala (KE)	0
Tarif (T)		5	
Jumlah	15		
Total		20	
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	0
		Bandar Udara (BU)	0
		Pelabuhan Nasional (PN)	19
		Infrastruktur (I)	0
		Pelayanan (PL)	3
		Badan Pengusahaan (BP)	7
	Jumlah	29	
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	5
		Bea Cukai (BC)	0
		Pelabuhan Internasional (PI)	9
		Fasilitas (F)	3
Tempat Penimbunan (TP)		0	
Jumlah	17		
Total		46	

Sumber: Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

1. Aktor

Berdasarkan beberapa *keywords* dalam indikator aktor seperti aktor pusat terdiri dari Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Berdasarkan hasil pendeteksian, didalam aktor pusat memiliki kata kunci terbanyak yang ditemukan berjumlah 42 kata, sedangkan, kata kunci terbanyak kedua ditemukan dalam aktor swasta yaitu 2 kata dan kata terkecil yang ditemukan adalah aktor daerah dengan kata kunci Pemerintah Daerah (PD) dengan jumlah 1 kata dibandingkan dengan kata kunci lain di aktor daerah tidak ditemukan yaitu 0.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Peraturan Pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2012, penulis menggunakan indikator Tata Kelola Perdagangan Bebas dengan beberapa kata kunci Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W). Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T). Kata kunci lain yang ditemukan dalam Pro-Investasi 14 kata sedangkan, disinvestasi berjumlah 44 kata. Total dari keseluruhan kata kunci dalam indikator ini berjumlah 58 kata.

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Salah satu indikator dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Efisiensi Manajemen Pelabuhan dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestic) yaitu Pembebasan (PB),

Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP) dengan jumlah 50 kata. Outward Looking (melayani kebutuhan luar negeri) antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP) kata yang ditemukan berjumlah 46.

Tabel 3.4

Indikator		Keywords	Score
Aktor	Pusat	Presiden (P)	0
		Pemerintah Pusat (PP)	1
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	29
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	12
		Kepala Badan Pengusahaan (KP)	0
	Jumlah	42	
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	0
		Pemerintah Daerah (PD)	1
		Gubernur (G)	0
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
		Kepala Daerah (KD)	0
	Jumlah	1	
Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	2	
Jumlah	2		
Total			45
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	1
		Perdagangan Internasional (KI)	3
		Percepatan (PC)	0
		Jaminan (J)	1
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	2
		Waktu (W)	7
	Jumlah	14	
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	15
		Pertimbangan (PB)	2
		Pengurusan (PG)	5
		Pajak (PA)	20
		Kendala (KE)	1
		Tarif (T)	1
Jumlah	44		
Total			58
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	18
		Bandar Udara (BU)	10
		Pelabuhan Nasional (PN)	3
		Infrastruktur (I)	1
		Pelayanan (PL)	3
		Badan Pengusahaan (BP)	15
	Jumlah	50	
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	13
		Bea Cukai (BC)	7
		Pelabuhan Internasional (PI)	4
		Fasilitas (F)	5
		Tempat Penimbunan (TP)	17
Jumlah		46	
Total			96

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai

1. Aktor

Dari sisi indikator aktor dibagi menjadi tiga bagian yaitu pusat, daerah dan swasta untuk mempermudah mendeteksi, maka penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai berikut aktor pusat terdiri dari Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Kata yang sering muncul pada saat indikator terhadap aktor swasta yaitu pengusaha/pelaku usaha dengan jumlah 40 kata, aktor pusat memiliki kata sebanyak 12 kata dan aktor daerah yang paling sedikit dengan jumlah 1 kata. Secara keseluruhan, dari indikator aktor ini memiliki jumlah 53 kata.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Dalam indikator Tata Kelola Perdagangan Bebas, penulis memakai beberapa kata kunci yaitu Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W). Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T). Kata kunci lain yang ditemukan dalam Pro-Investasi 42 kata sedangkan, disinvestasi berjumlah 69 kata. Jika diakumulasikan dalam indikator ini, kata kunci memiliki sebanyak 111 kata.

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Indikator Efisiensi Manajemen Pelabuhan, penulis menggunakan beberapa *keywords* yaitu dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestic) yaitu Pembebasan

(PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP). Outward Looking (melayani kebutuhan luar negeri) antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP). Dalam Inward looking ditemukan 46 kata sedangkan, outward looking adalah 3 kata.

Tabel 3.5

Indikator		Keywords	Score
Aktor	Pusat	Presiden (P)	0
		Pemerintah Pusat (PP)	1
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	5
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	6
		Kepala Badan Pengusahaan (KP)	0
	Jumlah		12
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	0
		Pemerintah Daerah (PD)	1
		Gubernur (G)	0
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
		Kepala Daerah (KD)	0
	Jumlah		1
Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	40	
Jumlah		40	
Total			53
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	0
		Perdagangan Internasional (KI)	0
		Percepatan (PC)	0
		Jaminan (J)	14
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	0
		Waktu (W)	28
	Jumlah		42
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	10
		Pertimbangan (PB)	2
		Pengurusan ((PG)	5
		Pajak (PA)	34
		Kendala (KE)	0
		Tarif (T)	18
	Jumlah		69
Total			111
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	7
		Bandar Udara (BU)	3
		Pelabuhan Nasional (PN)	2
		Infrastruktur (I)	0
		Pelayanan (PL)	15
		Badan Pengusahaan (BP)	19
	Jumlah		46
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	0
		Bea Cukai (BC)	1
		Pelabuhan Internasional (PI)	2
		Fasilitas (F)	0
Tempat Penimbunan (TP)		0	
Jumlah		3	
Total			49

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

1. Aktor

Analisis konten yang penulis lakukan terhadap Undang-Undang yang diterbitkan pada tahun 2007 memakai beberapa kata kunci sebagai berikut aktor pusat terdiri dari Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Hasil dari temuan ini secara keseluruhan berjumlah 6 kata. Kata kunci dalam indikator aktor pusat dan aktor daerah masing-masing memiliki 3 kata, sedangkan aktor swasta tidak ditemukan hasilnya atau bernilai 0.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Indikator Tata Kelola Perdagangan Bebas, melalui beberapa kata kunci yang digunakan yaitu Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W). Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T). Kata kunci lain tidak ditemukan dalam Pro-Investasi sedangkan, disinvestasi hanya terdeteksi 1 kata.

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Didalam indikator Efisiensi Manajemen Pelabuhan, terdapat beberapa kata kunci seperti berikut yaitu dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestic) yaitu Pembebasan (PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP) dengan

total 4 kata. Outward Looking (melayani kebutuhan luar negeri) antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP), namun tidak ditemukan kata sama sekali di indikator ini.

Tabel 3.6

Indikator		Keywords	Score
Aktor	Pusat	Presiden (P)	0
		Pemerintah Pusat (PP)	3
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	0
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	0
		Kepala Badan Pengusahaan (KP)	0
	Jumlah	3	
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	0
		Pemerintah Daerah (PD)	3
		Gubernur (G)	0
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
		Kepala Daerah (KD)	0
	Jumlah	3	
Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	0	
Jumlah	0		
Total			6
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	0
		Perdagangan Internasional (KI)	0
		Percepatan (PC)	0
		Jaminan (J)	0
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	0
		Waktu (W)	0
	Jumlah	0	
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	0
		Pertimbangan (PB)	0
		Pengurusan (PG)	0
		Pajak (PA)	0
		Kendala (KE)	1
Tarif (T)		0	
Jumlah	1		
Total			1
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	0
		Bandar Udara (BU)	0
		Pelabuhan Nasional (PN)	4
		Infrastruktur (I)	0
		Pelayanan (PL)	0
		Badan Pengusahaan (BP)	0
	Jumlah	4	
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	0
		Bea Cukai (BC)	0
		Pelabuhan Internasional (PI)	0
		Fasilitas (F)	0
		Tempat Penimbunan (TP)	0
	Jumlah	0	
Total			4

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

G. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

1. Aktor

Melalui indikator aktor, dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan tahun 2019, terdapat beberapa *keywords* sebagai berikut aktor pusat terdiri Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Hasil dari keseluruhan dalam konten analisis ini berjumlah 28 kata. Terdiri dari indikator aktor pusat memiliki kata terbanyak yaitu 21 kata yang diwakilkan oleh kata kunci pemerintah pusat 3 dan kepala badan pengusahaan sebanyak 17 kata. Indikator aktor daerah berjumlah 7 kata terdiri dari kata kunci dewan kawasan yang memiliki 6 kata dan pemerintah daerah yang hanya berjumlah 1 kata. Sedangkan, kata kunci dari aktor swasta bernilai 0 atau tidak ditemukan sama sekali.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Dari sisi Tata Kelola Perdagangan Bebas, penulis menggunakan beberapa kata kunci antara lain Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W). Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T). Kata kunci dideteksi berjumlah 5 dalam Pro-Investasi sedangkan, disinvestasi bernilai 32 kata. Jadi, total keseluruhan indikator ini yaitu 37 kata.

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Indikator Efisiensi Manajemen Pelabuhan, terdapat beberapa kata kunci antara lain dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestik) yaitu Pembebasan (PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP). Outward Looking (melayani kebutuhan luar negeri)

antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP). Dengan masing-masing kata kunci 34 kata dalam inward looking, dan 10 kata dalam outward looking.

Tabel 3.7

Indikator		Keywords	Score
Aktor	Pusat	Presiden (P)	0
		Pemerintah Pusat (PP)	0
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	0
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	1
		Kepala Badan Pengusahaan (KP)	17
	Jumlah		18
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	6
		Pemerintah Daerah (PD)	1
		Gubernur (G)	0
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
Kepala Daerah (KD)		0	
Jumlah		7	
Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	0	
Jumlah		0	
Total			25
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	0
		Perdagangan Internasional (KI)	0
		Percepatan (PC)	0
		Jaminan (J)	0
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	0
		Waktu (W)	5
	Jumlah		5
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	22
		Pertimbangan (PB)	1
		Pengurusan ((PG)	2
		Pajak (PA)	4
		Kendala (KE)	0
Tarif (T)		3	
Jumlah		32	
Total			37
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	1
		Bandar Udara (BU)	0
		Pelabuhan Nasional (PN)	4
		Infrastruktur (I)	0
		Pelayanan (PL)	1
		Badan Pengusahaan (BP)	28
		Jumlah	
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	1
		Bea Cukai (BC)	0
		Pelabuhan Internasional (PI)	3
		Fasilitas (F)	6
Tempat Penimbunan (TP)	0		
Jumlah		10	
Total			44

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

H. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

1. Aktor

Hasil analisis konten dalam indikator aktor dengan *keywords* antara lain aktor pusat terdiri dari Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Didalam Peraturan ini, kata terbanyak yang ditemukan adalah indikator dari pengusaha/pelaku usaha, yaitu sebanyak 14 kata. Kata lain yang ditemukan yaitu indikator aktor pusat dari kata kunci direktorat jenderal berjumlah 6 kata. Namun, untuk kata kunci dalam indikator aktor daerah, tidak ditemukan sama sekali sehingga, aktor-aktor daerah tidak memiliki peran yang signifikan terhadap proses ini.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Tata Kelola Perdagangan Bebas merupakan salah satu indikator yang penulis gunakan untuk mendeteksi Peraturan ini, menggunakan beberapa kata kunci yaitu Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W) dengan total 2 kata. Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T) dengan total 12 kata. Hasil temuan dalam indikator memiliki dengan jumlah 14 kata.

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Dalam indikator Efisiensi Manajemen Pelabuhan, penulis menetapkan beberapa *keywords* dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestic) yaitu Pembebasan (PB),

Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP). Outward Looking (melayani kebutuhan luar negeri) antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP). Di inward looking berjumlah 5 kata, sedangkan outward looking 11 kata.

Tabel 3.8

Indikator		Keywords	Score
Aktor	Pusat	Presiden (P)	0
		Pemerintah Pusat (PP)	0
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	0
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	6
	Kepala Badan Pengusahaan (KP)	0	
	Jumlah		6
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	0
		Pemerintah Daerah (PD)	0
		Gubernur (G)	0
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
	Jumlah		0
Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	14	
Jumlah		14	
Total			20
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	0
		Perdagangan Internasional (KI)	0
		Percepatan (PC)	0
		Jaminan (J)	2
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	0
	Jumlah		2
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	1
		Pertimbangan (PB)	0
		Pengurusan ((PG)	6
		Pajak (PA)	4
		Kendala (KE)	0
Tarif (T)	1		
Jumlah		12	
Total			14
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	1
		Bandar Udara (BU)	0
		Pelabuhan Nasional (PN)	0
		Infrastruktur (I)	0
		Pelayanan (PL)	3
	Jumlah		5
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	0
		Bea Cukai (BC)	3
		Pelabuhan Internasional (PI)	2
		Fasilitas (F)	0
		Tempat Penimbunan (TP)	6
Jumlah		11	
Total			16

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

I. Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

1. Aktor

Hasil penelitian analisis konten dalam indikator aktor dengan beberapa kata kunci aktor pusat terdiri dari Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Hasil analisis konten ini, kata terbanyak ditemukan dalam aktor pusat sebanyak 31 kata. Didalam aktor daerah ditemukan 17 kata. Sedangkan dari aktor swasta dengan kata kunci pengusaha/pelaku usaha ditemukan sebanyak 4 kata. Sehingga, jika di akumulasikan berjumlah 52 kata didalam indikator aktor.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Berdasarkan hasil konten ini, bahwa dengan menggunakan beberapa kata kunci yaitu Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W). Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T). Pendeteksian yang dilakukan ditemukan pro-investasi berjumlah 12 kata. Kata kunci indikator disinvestasi berjumlah 14 kata.

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Dari sisi Efisiensi Manajemen Pelabuhan, Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2017 penulis menetapkan beberapa keywords dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestic) yaitu Pembebasan (PB), Bandar Udara (BU),

Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP). Outward Looking (melayani kebutuhan luar negeri) antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP). Hasil yang ditemukan 28 kata dalam inward looking, sedangkan outward looking hanya 1 kata saja yang terdeteksi.

Tabel 3.9

6]		Keywords	Score
Aktor	Pusat	Presiden (P)	0
		Pemerintah Pusat (PP)	0
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	17
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	6
		Kepala Badan Pengusahaan (KP)	14
	Jumlah		37
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	17
		Pemerintah Daerah (PD)	0
		Gubernur (G)	0
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
		Kepala Daerah (KD)	0
	Jumlah		17
Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	4	
Jumlah		4	
Total			58
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	0
		Perdagangan Internasional (KI)	9
		Percepatan (PC)	2
		Jaminan (J)	0
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	0
		Waktu (W)	1
	Jumlah		12
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	12
		Pertimbangan (PB)	0
		Pengurusan (PG)	0
		Pajak (PA)	2
		Kendala (KE)	0
		Tarif (T)	0
Jumlah		14	
Total			26
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	0
		Bandar Udara (BU)	0
		Pelabuhan Nasional (PN)	4
		Infrastruktur (I)	0
		Pelayanan (PL)	0
		Badan Pengusahaan (BP)	24
	Jumlah		28
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	0
		Bea Cukai (BC)	0
		Pelabuhan Internasional (PI)	1
		Fasilitas (F)	0
		Tempat Penimbunan (TP)	0
	Jumlah		1
Total			29

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

J. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

1. Aktor

Dalam Peraturan ini, penulis menggunakan beberapa kata kunci yang relevan seperti aktor pusat terdiri dari Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU). Hasil penemuan ini, dalam indikator aktor pusat berjumlah 21 yang terdiri dari kata kunci menteri sebanyak 9 kata, kepala badan pengusahaan 3 kata, presiden berjumlah 2 kata dan pemerintah pusat 1 kata. Indikator aktor daerah yang ditemukan hanya dewan kawasan yang memiliki hasil sebanya 22 kata. Sedangkan indikator aktor swasta hanya memiliki 1 kata. Sehingga, dari hal ini jumlah dari keseluruhan indikator aktor terdapat 38 kata yang ditemukan.

2. Tata Kelola Perdagangan Bebas

Penulis menggunakan beberpa kata kunci dalam indikator Tata Kelola Perdagangan Bebas antara lain Pro-Investasi yaitu Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W). Disinvestasi terdiri dari Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T). Kata kunci yang ditemukan terbanyak yaitu sebanyak 2 kata. Kata didalam disinvestasi sebanyak 1 kata didalam diksi perizinan (pz).

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Hasil analisis konten dalam Peraturan Menteri tahun 2016, memakai beberapa kata kunci yaitu dibagi menjadi dua yaitu Inward Looking (melayani kebutuhan domestic) yaitu Pembebasan

(PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP) berjumlah 12 kata. Outward Looking (melayani kebutuhan luar negeri) antara lain Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP) total 2 kata. Sehingga, akumulasi dari indikator ini berjumlah 14 kata yang ditemukan dalam peraturan menteri ini.

Tabel 3.10

Indikator	Keywords	Score	
Aktor	Pusat	Presiden (P)	2
		Pemerintah Pusat (PP)	1
		Diplomat (D)	0
		Duta Besar (DB)	0
		Menteri (M)	9
		Menteri Luar Negeri (MLN)	0
		Lembaga Negara (LN)	0
		Direktorat Jenderal (DJ)	0
		Kepala Badan Pengusahaan (KP)	3
	Jumlah	15	
	Daerah	Dewan Kawasan (DK)	22
		Pemerintah Daerah (PD)	0
		Gubernur (G)	0
		Walikota (W)	0
		DPRD	0
		Kepala Daerah (KD)	0
	Jumlah	22	
Swasta	Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	1	
Jumlah	1		
Total		38	
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro Investasi	Kemudahan (K)	0
		Perdagangan Internasional (KI)	0
		Percepatan (PC)	0
		Jaminan (J)	0
		Insentif (IS)	0
		Kelancaran (KE)	1
		Waktu (W)	1
	Jumlah	2	
	Disinvestasi	Perizinan (PZ)	1
		Pertimbangan (PB)	0
		Pengurusan ((PG)	0
		Pajak (PA)	0
		Kendala (KE)	0
Tarif (T)		0	
Jumlah	1		
Total		3	
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking	Pembebasan (PB)	0
		Bandar Udara (BU)	0
		Pelabuhan Nasional (PN)	5
		Infrastruktur (I)	0
		Pelayanan (PL)	0
		Badan Pengusahaan (BP)	7
	Jumlah	12	
	Outward Looking	Bongkar Muat (BM)	0
		Bea Cukai (BC)	0
		Pelabuhan Internasional (PI)	2
		Fasilitas (F)	0
		Tempat Penimbunan (TP)	0
		Jumlah	2
Total		14	

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam